



**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PENGGUNAAN METERAI
ELEKTRONIK / E-METERAI DI INDONESIA”**

UNDERGRADUATE THESIS

Submitted as one of the requirements to obtain

Sarjana Hukum (S.H)

By:

RIKA FEBRIANDA PUTRI

017201905001

FACULTY OF HUMANIORA

LAW STUDY PROGRAM

CIKARANG

JULY, 2023

TURNITIN PLAGIARISM CHECK RESULT

Rika Febrianda-Turnitin

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	www.alsalcugm.org Internet Source	1%
5	aguspajak.com Internet Source	1%
6	tribunpontianakwiki.tribunnews.com Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
9	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1%

GPT ZERO PLAGIARISM CHECK RESULT

Stats

Average Perplexity Score: 1684.129

A document's perplexity is a measurement of the randomness of the text

Burstiness Score: 5309.595

A document's burstiness is a measurement of the variation in perplexity

Your sentence with the highest perplexity, "Advisor", has a perplexity of: 36723

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan penggunaan meterai elektronik di Indonesia dengan mengetahui kekuatan hukumnya serta upaya apa yang telah diupayakan oleh pemerintah terhadap meterai elektronik sehingga penggunaan meterai elektronik tidak dapat dipakai berulang pada dokumen elektronik lainnya. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan meterai elektronik dengan meterai tempel dan cara pembubuhan meterai elektronik yang sesuai dengan UU Bea Meterai. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan undang-undang dipergunakan dalam menganalisa penerapan penggunaan Meterai Elektronik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kajian didapatkan hasil bahwa kekuatan hukum Meterai Elektronik aspek legalitasnya telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Bea Meterai UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga Meterai Elektronik merupakan meterai yang legal secara hukum. Menurut kekuatan hukum berlaku yuridis Meterai elektronik adalah bentuk dari mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya dilihat dari segi kekuatan hukum berlaku sosiologis sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin mengikuti perkembangan teknologi. dan dilihat dari kekuatan hukum berlaku filosofis pada Meterai elektronik paska diberlakukannya Meterai Elektronik kaedah hukumnya dinilai sesuai dengan cita-cita hukum yang positif. Desain pada Meterai Elektronik terlihat sangat dipikirkan sedemikian rupa sebagai bentuk pemerintah dalam upaya untuk mencegah terjadinya penggunaan ganda E-meterai pada dokumen elektronik dan memberi pendelegasian kepada Badan yang ditunjuk sebagai percetakan Meterai Elektronik yaitu Perum Peruri yang tugasnya juga membangun sistem dan pendistribusian Meterai Elektronik.

Kata Kunci: *Dokumen Elektronik, Bea Meterai, Meterai Elektronik*

ABSTRACT

This study aims to analyze regulations for the use of electronic stamps in Indonesia by knowing their legal force and what efforts have been made by the government for electronic stamps so that the use of electronic stamps cannot be used repeatedly on other electronic documents. In this study there are also differences between electronic stamps and sticky stamps and the method of affixing electronic stamps in accordance with the Stamp Duty Law. The method used in this study is the normative juridical approach method and the statutory approach method is used in analyzing the implementation of the use of electronic stamps based on statutory provisions. The study found that the legal force of Electronic Stamps in terms of legality has been clearly regulated in the Stamp Duty Law Number 10 of 2020, so that Electronic Stamps are legal stamps legally. According to the legal force, electronic Metarai is a form of filling the legal void. Furthermore, in terms of the power of law, it applies sociologically as a fulfillment of the needs of the community which is increasingly following technological developments. and judging from the legal force that applies philosophically to electronic stamps after the enactment of electronic stamps, the legal basis is considered in accordance with positive legal ideals. The design of electronic stamps looks very thought out in such a way as a form of government in an effort to prevent the occurrence of dual use of E-stamps on electronic documents and to delegate to the agency designated as printing electronic stamps, namely Perum Peruri whose duties are also to build systems and distribution of electronic stamps.

Keywords: *Electonic Document, Stamp Duty, Eletronic Stamp*

DAFTAR ISI

PANEL OF EXAMINER APPROVAL	i
STATEMENT OF ORIGINALITY	ii
SCIENTIFIC PUBLICATION APPROVAL FOR ACADEMIC INTEREST	iii
ADVISOR'S APPROVAL FOR PUBLICATION	iv
TURNITIN PLAGIARISM CHECK RESULT	v
GPT ZERO PLAGIARISM CHECK RESULT	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Konseptual.....	5
1.6 Metode penelitian.....	6
1.7 Teknik pengumpulan bahan.....	7
1.8 Sitematika dalam penulisan.....	8
BAB II	9
BEA METERAI, METERAI ELEKTRONIK, DAN PERBEDAAN METERAI TEMPEL DENGAN E-METERAI	9
2.1 Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020).....	9
2.2 Meterai Elektronik.....	11
2.3 Perbedaan Meterai Tempel dengan E-Meterai.....	17
BAB III	21
KEKUATAN HUKUM METERAI ELEKTRONIK	21
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Kekuatan Hukum Ditinjau dari segi Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis.....	21

3.2 Kekuatan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.....	23
BAB IV	26
UPAYA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH PADA METERAI ELEKTRONIK UNTUK MENGHINDARI PEMAKAIAN BERULANG	26
BAB V	29
PENUTUP	29
5.1 Keimpulan.....	29
5.2 Saran.....	30
DAFTAR PUTAKA	31

